

Editor : M. Zidny Nafi' Hasbi

Book Chapter

Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan



Nikmatul Masruroh, Iqbal Fardian, Novi Febriyanti, Mohammad Dliyaul Muflih, Syarah Siti Supriyanti, Prima Yustitia Nurul Islami, Dunyati Ilmiah, Achmad Tarmidzi Anas, Endang Kartini Panggiarti, Setianingtyas Honggowati, Siti Arifah, Abdul Aziz, Jaya Mualimin, Urwatul Wusqo, Rusny Istiqomah Sujono, Meutia Layli, Dania Hellin Amrina, Bayu, Muhammad Adnan Firdaus, Iskandar Ritonga, Nurhayati, Retno Febriyastuti Widyawati, Dia Purnama Sari, Ipuk Widayanti, Achmad Budi Susetyo, Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, Dwi Martutiningrum, Nada Arina Romli, Suci Nurpratiwi, Muhamad Fauzi, Mahmudin, Muhamad Fauzi, Rahmat Dahlan

Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan

Nikmatul Masruroh,
Iqbal Fardian, Novi Febriyanti, dkk.



Circular Economy merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Penerapannya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih tinggi dibandingkan skenario “*business as usual*”.

Blue, Green, and Circular Economy memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan. Implementasinya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular bukanlah konsep baru. Tetapi, dunia baru tersadar akhir-akhir ini akan pentingnya melakukan transformasi dalam pendekatan ekonomi global sehingga menjadi berkelanjutan. Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan ketiga pendekatan ekonomi tersebut.

Adanya pergeseran ke arah ekonomi biru, hijau, dan sirkular harus ditempuh karena adanya peluang dan manfaat yang bisa dipetik. Indonesia telah berkontribusi dalam merealisasikan wacana global bertransisi ke model ekonomi berkelanjutan melalui berbagai program dan aksi nyata di forum G20. Pembangunan industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional. Prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini, pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri nasional.

Book Chapter ini hadir untuk membahas kajian terkait ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Selamat membaca!

Penerbit Jejak Pustaka

Jejak_Pustaka

081320748380

Jejakpustaka.com



EKONOMI SIRKULAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Editor: M. Zidny Nafi' Hasbi

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI SIRKULAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Editor: M. Zidny Nafi' Hasbi

Penulis :

Nikmatul Masruroh, Iqbal Fardian, Novi Febriyanti, Mohammad Dliyaul Muflihin, Syarah Siti Supriyanti, Prima Yustitia Nurul Islami, Dunyati Ilmiah, Achmad Tarmidzi Anas, Endang Kartini Panggiarti, Setianingtyas Honggowati, Siti Arifah, Abdul Aziz, Jaya Mualimin, Urwatul Wusqo, Rusny Istiqomah Sujono, Meutia Layli, Dania Hellin Amrina, Bayu, Muhammad Adnan Firdaus, Iskandar Ritonga, Nurhayati, Retno Febriyastuti Widyawati, Dia Purnama Sari, Ipuk Widayanti, Achmad Budi Susetyo, Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, Dwi Martutiningrum, Nada Arina Romli, Suci Nurpratiwi, Muhamad Fauzi, Mahmudin, Muhamad Fauzi, Rahmat Dahlan



EKONOMI SIRKULAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis :

Nikmatul Masruroh, Iqbal Fardian, Novi Febriyanti, Mohammad Dliyaul Muflihah, Syarah Siti Supriyanti, Prima Yustitia Nurul Islami, Duniyati Ilmiah, Achmad Tarmidzi Anas, Endang Kartini Panggiarti, Setianingtyas Honggowati, Siti Arifah, Abdul Aziz, Jaya Mualimin, Urwatul Wusqo, Rusny Istiqomah Sujono, Meutia Layli, Dania Hellin Amrina, Bayu, Muhammad Adnan Firdaus, Iskandar Ritonga, Nurhayati, Retno Febriyastuti Widyawati, Dia Purnama Sari, Ipuk Widayanti, Achmad Budi Susetyo, Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, Dwi Martutiningrum, Nada Arina Romli, Suci Nurpratiwi, Muhamad

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

Isi di Luar Tanggung Jawab Penerbit

ISBN: 978-623-8007-79-0

Editor:

M. Zidny Nafi' Hasbi

Tata Letak Isi:

Mufid Anwari

Desain Cover:

Bayu Aji Setiawan

iv + 376 hlm: 15 x 23 cm

Cetakan Pertama, November 2022

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Wirokerten RT.002 Desa Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

PENGANTAR EDITOR

Circular Economy merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Penerapannya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih tinggi dibandingkan skenario “*business as usual*”.

Blue, Green, and Circular Economy memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan. Implementasinya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular bukanlah konsep baru. Tetapi, dunia baru tersadar akhir-akhir ini akan pentingnya melakukan transformasi dalam pendekatan ekonomi global sehingga menjadi berkelanjutan. Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan ketiga pendekatan ekonomi tersebut. Adanya pergeseran ke arah ekonomi biru, hijau, dan sirkular harus ditempuh karena adanya peluang dan manfaat yang bisa dipetik. Indonesia telah berkontribusi dalam merealisasikan wacana global bertransisi ke model ekonomi berkelanjutan melalui berbagai program dan aksi nyata di forum G20.

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar **utama pembangunan perekonomian** nasional. Prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.



Saat ini, pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri nasional.

Book Chapter ini hadir untuk membahas kajian terkait ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Selamat membaca!

Yogyakarta, November, 2022
Editor,

M. Zidny Nafi' Hasbi



Daftar Isi

Pengantar Editor	i
Daftar Isi	iii
<i>Chapter 1</i>	
Ekonomi Sirkular: Sebuah Solusi Masa Depan Berkelanjutan ...	1
<i>Chapter 2</i>	
Industri Manufaktur dan Peran Digitalisasi Terhadap Ekonomi Sirkular	23
<i>Chapter 3</i>	
Perdagangan Internasional dan Transisi Dalam Ekonomi Sirkular	45
<i>Chapter 4</i>	
Perubahan Iklim dan Ekonomi Sirkular	67
<i>Chapter 5</i>	
Sistem Keuangan Ekonomi Sirkular	93
<i>Chapter 6</i>	
Implentasi dan Dampak Ekonomi Sirkular Di Indonesia	107
<i>Chapter 7</i>	
Ekonomi Sirkular Dalam Industri Perbankan dan Investasi..	127
<i>Chapter 8</i>	
Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi Dalam Ekonomi Sirkular	147
<i>Chapter 9</i>	
Politik, Ekonomi dan Perubahan Iklim	167
<i>Chapter 10</i>	
Peran Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran.....	185



<i>Chapter 11</i>	
Konsep dan Implementasi Pariwisata Hijau Di Indonesia.....	205
<i>Chapter 12</i>	
Teori dan Praktek Pemasaran Hijau	219
<i>Chapter 13</i>	
Sistem Keuangan Hijau dan Penerapannya Dalam Sektor Industri.....	231
<i>Chapter 14</i>	
Inovasi Pembangunan Berkelanjutan.....	245
<i>Chapter 15</i>	
<i>Sustainable Development Goals</i> dan Model Bisnis Baru.....	265
<i>Chapter 16</i>	
Peran <i>E-Commerce Business</i> Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	289
<i>Chapter 17</i>	
Mempercepat Transisi Menuju Keberlanjutan: Solusi Kebijakan Untuk Pembangunan Berkelanjutan	311
<i>Chapter 18</i>	
<i>Green Banking</i> Sebagai Solusi Perubahan Iklim Dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	325
<i>Chapter 19</i>	
<i>Green Banking</i> Untuk Industri Hijau dan Ekonomi Hijau	341
<i>Chapter 20</i>	
Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Hijau.....	357



Daftar Pustaka

- Adam, B., & Kütting, G. 1995. Time to reconceptualize ‘green technology’ in the context of globalization and international relations. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, No. 3 (8):243-259.
- Balaam, D. N., & Dillman, B. (2014). *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Pearson Education, Inc
- BMKG. 2016. *Monitoring Dinamika Atmosfer dan Prakiraan Curah Hujan September 2016 – Februari 2017*. Status Perkembangan 28 Oktober 2016. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
- Budianto, A.I. 2001. “Pengaruh Perubahan Iklim Global Terhadap Negara Kepulauan Indonesia.” Dalam Rajagukguk, E. dan Ridwan, K. Jakarta
- Dedi Junaedi, Faisal Salistia. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*. Simposium nasional keuangan Negara 2020. pertumbuhan ekonomi.pdf
- Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim (2022). <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>, Diakses pada tanggal: 12 September 2022
- Endang Larasati (2022). *Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 dan 2023 Kuat di Tengah Moderasi Pertumbuhan Ekonomi Global*. Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jakarta ikp.bkf@kemenkeu.go.id
- Favian Laksono Mahmud (2022) *Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman di Provinsi Dki Jakarta)*. Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Semarang
- Cerchia, R.E.; Piccolo, K. The Ethical Consumer and Codes of Ethics in the Fashion Industry. *Laws* 2019, 8, 23.



<https://doi.org/10.3390/laws8040023>Handoko, Klimatologi Dasar, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hlm.3

Dra. Ardina Purbo, M. Sc, Ir. Arif Wibowo, M. Sc, Dr. Lawin Bastian Tobing, Novia Widyaningtyas, S. Hut, M.S (2016). Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution. Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta: hal. 4

Madani, Muhlis. 2011. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perubahan-iklim-climate-change-32>, Diakses pada tanggal: 12 September 2022

Hadijah (2022) 5 Ekonom Ungkap Efek Kejutan Dari Kenaikan Harga BBM. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220906090635-4-369583/5-ekonom-ungkap-efek-kejutan-dari-kenaikan-harga-bbm>, Diakses pada tanggal: 13 september 2022

Faisal (2022) <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220912>. 14 September 2022

Retno Nur Indah (2022). Sejarah Pendirian G20.Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>. Diakses pada tanggal: 16 September 2022



Chapter 10

PERAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Oleh :

Rusny Istiqomah Sujono dan Meutia Layli

(Universitas Alma Ata)

rusnyistiqomah@almaata.ac.id

meutialayli@almaata.ac.id

Pendahuluan

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development pertama kali terkonsep sebagai tujuan sosial yang diperkenalkan dalam *United Nations Conference on the Environment* atau Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa di Stockholm di tahun 1972 (Candra, 2022). Konferensi tersebut diadakan karena dipicu oleh adanya kekhawatiran global pada kemiskinan berkepanjangan serta meningkatnya kemiskinan juga ketidakadilan sosial, ditambah lagi dengan adanya kebutuhan pangan yang berkepanjangan yang mana semua gal tersebut merupakan permasalahan global dan juga kesadaran pada ketersediaan sumber daya yang harusnya dapat mendukung pembangunan ekonomi. Konferensi di Stockholm tersebut dihadiri oleh delegasi dari negara maju dan juga negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia yang menghasilkan adanya kesepakatan



terkait harus diadakannya pertimbangan dari setiap masalah lingkungan pada program pembangunan yang telah dijalankan. Selain adanya hasil dalam bentuk kesepakatan, konferensi tersebut juga mengarahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melalui *World Conference on Environment and Development* (WCED) yang diadakan pada tahun 1987 telah berhasil mempublikasikan laporan dengan judul *Our Common Future* atau *Brundtland Report* yang berisi terkait konsep dari pembangunan yang berkelanjutan (Zhu & Hua, 2017). Menurut Brundtland Report tersebut pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan dari generasi masa depan. Menurut Rogers dalam WCED, mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan ini sebagai konsep yang dapat menggali adanya keterkaitan antara pembangunan ekonomi, lingkungan yang berkualitas, dan keadilan sosial (Hajian & Kashani, 2021). Hal tersebut akan terhubung langsung pada upaya sadar serta terencana dalam menyatukan aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan agar dapat menjamin adanya keutuhan lingkungan hidup dan juga kesejahteraan, kemampuan, dan juga keselamatan generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yaitu ekonomi, sosial serta lingkungan yang terintegrasi. Pemahaman pembangunan berkelanjutan harus dipahami secara luas yaitu pemahaman yang mengaitkan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Adanya masalah tentang ketersediaan air, tanah, bahan pangan, maupun energi adalah akibat dari perilaku manusia yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan dapat secara jelas terlihat pengelolaan



dari sumber daya alam yang harus dilakukan secara baik dan hati-hati dengan tujuan generasi yang akan datang akan tetap bisa menikmati kekayaan alam yang dijaga sejak saat ini (Owens, 2017).

Saat ini pembangunan berkelanjutan telah dicapai secara pesat dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Namun seiring dengan pesatnya pembangunan tersebut, ada kemunduran yang terjadi. Kemunduran tersebut adalah pada kemampuan sumberdaya alam seperti tanag, air, serta hutan telah terkuras. Tidak hanya itu, pada sumberdaya perikanan, minyak, dan juga tambang juga mulai terkuras dan bahkan merusak lingkungan peninggalan dari eksploitasi tersebut. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan juga bentuk hal yang merugikan lingkungan, yaitu sampah, limbah, serta buangan dalam bentuk gas, cair, maupun padat dan tingkat kebisingan atau tekanan. Maka dari itu, saat ini yang harus dijaga yaitu bagaimana hasil-hasil tersebut tidak melebihi ambang batas serta daya dukung lingkungan.

Daya tampung lingkungan tidak boleh melebihi batasan, karena jika terlampaui akan membuat sturktur dan fungsi dasar ekosistem yang mana digunakan sebagai penunjang kehidupan akan mengalami kerusakan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan membuat keadaan yang membebani lingkungan serta sosial, dan pada akhirnya masyarakat dan pemerintah akan menanggung beban dalam pemulihannya. Oleh sebab itu, sumberdaya alam yang digayaguna sebagai dasar dari kemakmuran rakyat harus dilakukan dengan sangat baik, terencana, optimal, rasional, sderta bertanggungjawab dengan memperhatikan dari segala aspek termasuk keseimbangan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan (Monkelbaan, 2019).



A. Tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan yang harus dicapai yang disebut Sustainable Development Goals. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang selalu mengawasi tentang peningkatan perekonomian masyarakat yang sejahtera yang dilihat dari kehidupan sosial masyarakatnya, lalu pengawasan juga dilakukan untuk melihat kualitas dari lingkungan hidup dan dapat menjamin terlaksananya tata kelola serta keadilan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap generasi (Adams, 2017).

Salah satu komitmen global dan juga nasional untuk mengupayakan kesejahteraan sosial dalam pembangunan berkelanjutan memiliki 17 tujuan yaitu (1) Tidak ada kemiskinan, (2) Tidak ada kelaparan, (3) Memiliki kehidupan yang sehat dan sejahtera, (4) Memastikan pendidikan yang berkualitas, (5) Mencapai kesetaraan gender, (6) Memiliki air yang bersih dan sanitasi yang layak, (7) Memastikan energi yang bersih serta terjangkau, (8) Pekerjaan yang layak dan Pertumbuhan ekonomi, (9) Membangun infrastruktur yang inovatif untuk mendukung industrialisasi, (10) Mengurangi adanya kesenjangan atau ketimpangan, (11) Membangun kota serta pemukiman yang aman dan berkelanjutan, (12) Memastikan konsumsi dan produksi yang manfaat serta berkelanjutan, (13) Melakukan aksi dengan segera dengan adanya perubahan iklim serta dampaknya, (14) Melindungi dan memanfaatkan ekosistem laut, (15) Melindungi dan memanfaatkan ekosistem daratan, (16) Membentuk masyarakat yang damai, menerapkan keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan (17) memperkuat serta melakukan revitalisasi kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Bappeda, 2020).



Saat ini strategi dan upaya untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan sangat diprioritaskan, dan pastinya membutuhkan sinergi dari setiap kebijakan perencanaan pada tingkat nasional. Dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat empat pilar utama sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN NOMOR PER-05/MBU/04/2021 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BPK, 2021) yaitu:

1. Pilar Sosial: yaitu pilar agar tercapainya pemenuhan hak dasar setiap manusia yang berkualitas dan adil serta setara agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pilar Lingkungan: yaitu pilar yang mengatur pengelolaan terkait dengan sumberdaya alam serta lingkungan yang berkelanjutan agar tersangganya seluruh aspek kehidupan.
3. Pilar Ekonomi: yaitu pilar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan keberlanjutan adanya peluang usaha dan kerja, industri, inovatif, inklusif, energi bersih, dan infrastruktur yang memadai.
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola: yaitu pilar yang mendukung terwujudnya kepastian hukum serta tata kelola dengan transparan, efektif, partisipatif, dan akuntabel agar dapat terciptanya stabilitas keamanan dan negara yang berdasarkan oleh hukum.

B. *Triple Bottom Line*, Indikator dan Alat Ukur Pembangunan Berkelanjutan

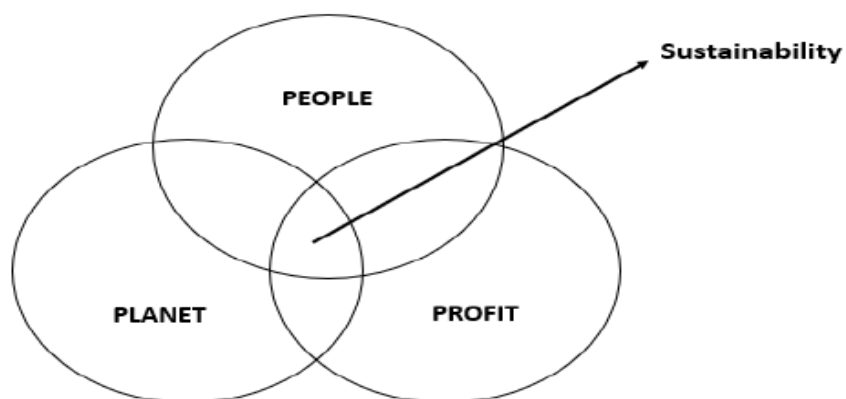
Triple Bottom Line yang pertama kali diperkenalkan oleh salah satu tokoh yang bernama John Elkington pada tahun 1998 yang memberi anjuran supaya setiap aspek dalam masyarakat harus mengukur kinerja dari masing-masing hal yang dilakukan karena



pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam cakupan yang luas, bahkan juga dapat mempengaruhi lingkungan dimana masyarakat tersebut beroperasi. Triple Bottom Line sendiri merupakan konsep secara berkelanjutan yang digunakan dalam mengukur kinerja dengan mempertimbangkan berbagai faktor dari ukuran kinerja ekonomis seperti pendapatan profit, bentuk kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan atau yang dapat disebut “Profit – Planet – People”. People adalah sosial, Planet adalah lingkungan dan Profit adalah ekonomi.

Triple Bottom Line yang pertama kali diperkenalkan oleh salah satu tokoh yang bernama John Elkington pada tahun 1998 yang memberi anjuran supaya setiap aspek dalam masyarakat harus mengukur kinerja dari masing-masing hal yang dilakukan karena pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam cakupan yang luas, bahkan juga dapat mempengaruhi lingkungan dimana masyarakat tersebut beroperasi (Giang et al., 2022). Triple Bottom Line sendiri merupakan konsep secara berkelanjutan yang digunakan dalam mengukur kinerja dengan mempertimbangkan berbagai faktor dari ukuran kinerja ekonomis seperti pendapatan profit, bentuk kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan atau yang dapat disebut “Profit – Planet – People”. People adalah sosial, Planet adalah lingkungan dan Profit adalah ekonomi.





Gambar 1: Sustainable Development Mod

Pembangunan berkelanjutan yang ditinjau dari tiga aspek yaitu pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ketiga aspek tersebut menimbulkan hubungan sebab dan akibat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena aspek satu akan mempengaruhi aspek yang lain. Aspek ekonomi dan sosial yang saling berpengaruh diharapkan dapat menciptakan suatu hubungan yang adil atau equitable. Aspek ekonomi dan lingkungan yang saling berpengaruh diharapkan dapat berjalan dengan baik atau viable. Selain itu, aspek sosial dan lingkungan yang memiliki tujuan untuk kelestarian alam juga diharapkan dapat terus bertahan atau bearable. Ketiga aspek tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan diharapkan agar dapat menciptakan kondisi pembangunan yang baik dan berkelanjutan atau sustainable (Khana et al., 2021). 3P atau People, Planet, dan Profit digunakan untuk mengukur sebuah kesuksesan yang dicapai oleh suatu negara dan dapat digunakan juga untuk melakukan beberapa hal lain serta mengkaji dampak pembangunan terhadap lingkungan (Hammer & Pivo, 2016). 1) *People* (Sosial); Melihat bagaimana sebuah negara peduli kepada masyarakatnya dengan memberikan banyak program



yang akomodatif dan bertujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi serta kesejahteraan masyarakat. 2) Planet (Lingkungan); Melihat bagaimana pencapaian pada pembangunan berkelanjutan dengan ditinjau dari aspek lingkungan hidup yang dapat memberi dampak pada masyarakat. 3) Profit (Ekonomi); Setiap keuntungan yang ditekan secara maksimal dan ditinjau dari aspek efisiensi biaya, birokrasi, dan reformasi.

Dari tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat menghasilkan tiga outcome yaitu outcome ekonomi, outcome lingkungan, dan outcome sosial. Dari hal tersebut maka harus ada sasaran ekonomi yang dituju yaitu adanya efisiensi, pertumbuhan (growth), produksi, pengguna (consumers), dan juga pendapatan yang maksimal. Selain itu sasaran selanjutnya adalah sasaran sosial yang mana harus bisa mencapai adanya pemberdayaan (empowerment), equity, stabilitas sistem sosial dan juga budaya. Selanjutnya sasaran ketiga yaitu sasaran ekologi, dengan mencapai stabilitas sistem, dan biodiversity (Utomo et al., 2021).

Terdapat empat prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat mendukung dari berbagai aspek. Prinsip pertama yaitu pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip ini diharapkan dapat menjamin adanya keadilan pada setiap generasi terutama pada generasi saat ini dan yang akan datang. Selain itu pemerataan pada sumber daya alam serta kesejahteraan sosial. Prinsip kedua yaitu menghargai keanekaragaman (diversity). Prinsip ini diharapkan dapat melindungi dan melestarikan adanya keanekaragaman hayati budaya. Prinsip ketiga yaitu pendekatan integratif. Prinsip ini diharapkan dapat lebih memperhatikan keterkaitan manusia dengan



sistem alam serta hubungan yang harus dilihat secara integratif. Prinsip ke empat yaitu perspektif jangka panjang yang mana harus dapat memperhatikan masa depan yang harus lebih baik dari masa sekarang.

1. Penyebab Kemiskinan dan Pengangguran

Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan ini adalah Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran. Upah Minimum Provinsi dapat meningkatkan dan memenuhi kebutuhan hidup para pekerja untuk dapat memenuhi standar hidup minimum, dan juga berdampak pada kesejahteraan pekerja, sehingga akan menyelamatkan pekerja dari kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat mampu menciptakan kualitas pekerja yang bagus baik dari segi pengetahuan dan kemampuan. Pertumbuhan ekonomi yang bagus menggambarkan bahwa perbandingan pendapatan dan pengeluaran penduduk sangat bagus sehingga dapat menggambarkan peningkatan kualitas hidup penduduk. Pengangguran berdampak pada kemiskinan seseorang, seseorang yang dikatakan penganggur berarti dia kehilangan sumber pendapatannya, sehingga kebutuhannya tidak dapat terpenuhi (Priseptian & Primandhana, 2022).

Selain kemiskinan, masalah perekonomian yang lain adalah Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Penganggura umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran,



produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah social lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsum-sinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Ktingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan social sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah berat. Para ekonomi mempelajari pengangguran untuk mengidentifikais penyebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan pblik yang mempengaruhinya. Sebagian dari program kebijakan tersebut, program pelatihan kerja. Pengangguran disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

2. Alat Ukur Kemiskinan dan Pengangguran

a. *Head Count Ratio*

Salah satu ukuran kemiskinan yang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah “*head count ratio*” atau insiden kemiskinan. Rasio jumlah kepala pada dasarnya adalah proporsi dari total penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis



kemiskinan yang ditentukan. Jadi, misalkan ada n rumah tangga, yang pendapatannya adalah y_1, y_2, \dots, y_n . Misalkan z adalah garis kemiskinan pendapatan, dan ada m rumah tangga dengan pendapatan y_1, y_2, \dots, y_m , yang kurang dari (atau sama dengan) z , maka rasio jumlah kepala (H) hanyalah rasio m terhadap n , yaitu, $H(y,z) = m/n$ (Roslan, 2004)

b. Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan yaitu mengukur jumlah pendek jatuhnya pendapatan setiap orang miskin dari garis kemiskinan. Dengan demikian, mengukur kedalaman kemiskinan orang miskin. Jika pendapatan orang miskin ke- i adalah y_i , dan garis kemiskinan pendapatan adalah z , maka kesenjangan pendapatan-kemiskinan adalah $z - y_i$. Jika unit pendapatan total yang miskin adalah m , maka kesenjangan agregat semua orang miskin akan menjadi penjumlahan dari semua kesenjangan pendapatan individu, yaitu, $I = \sum_{i=1}^m (z - y_i)$.

Keuntungan dari kesenjangan pendapatan adalah mengidentifikasi jumlah total pendapatan yang dibutuhkan untuk mengangkat semua orang miskin ke garis kemiskinan, yaitu jumlah pendapatan minimum yang diperlukan untuk menghapus kemiskinan. Karena ekspresi di atas mengabaikan jumlah orang yang jatuh di bawah garis kemiskinan, rasio kesenjangan pendapatan lebih disukai. Ini adalah versi normal dari kesenjangan pendapatan, untuk membuatnya independen dari jumlah orang miskin (sebagai serta mata uang di mana pendapatan kemiskinan dicatat). Rasio kesenjangan pendapatan diperoleh dengan menormalkan ekspresi di atas dengan membaginya dengan faktor mz , yaitu $I = \sum_{i=1}^m (z - y_i) / (mz)$.

